

**PERILAKU TIDAK MEMILIH MASYARAKAT DESA DI
KECAMATAN MANDAU DALAM PILKADA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2015
(Studi Kasus Desa Bumbang dan Desa Pamesi)**

Oleh :

Andi Saputra Hasugian

Email: andisaputrasahugian@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si.

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru – Panam
28293 Telp. Fax. 0761 63277**

Abstract

Behavior does not choose interesting to study because it is showing the public outcry over what happens in political activities that took place. This study describes the behavior did not vote in the two villages of Bumbang and Village Pamesi. This study refers to main village and village expansion highest level of behavior is not chosen in the District Saber.

This study used qualitative methods and was conducted at the Bumbang and Pamesi Village, District Mandau, Bengkalis 2015. This research use informants as sources of information objects that aims to achieve mastery in getting information. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants. Analysis of the data in the study was done descriptively to explain the data in a systematic and objective so as to produce factual information, real-time and accurate.

Based on the results of the study found the following: Awareness and trust are the main thing in using the right to vote or participate in the elections, it should be emphasized to the public that the vote is important because it involves who will lead their area the next five years and are very influential for the policy to be changed and that will be made by the elected regional head. The causes of the villagers and village Bumbang Pamesi not choose that administrative problems, not in place when the election, do not know the candidate, lack of socialization of the organizers and of the candidates will be selected and prefer to work rather than having to choose saat elections. This shows the high and various behavioral factors did not choose in the Village and Village Bumbang Pamesi. So it takes people who are aware and believe it is a choice that the elections means changes carrier for the progress of a region. The role of the organizers is Bengkalis district commissioner is expected to reduce the behavior did not choose in Bengkalis and establish people's confidence that they as organizers were able to hold elections in a fair, honest, free and confidential. Election Commission as a service provider must be able to demonstrate a neutral attitude towards all candidates are ahead in the election so that people trust and believe there is no manipulation in the electoral process.

Keywords: Non voting behavior, election

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam Undang – Undang No.32 Tahun 2004 mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.¹ Dalam Undang – Undang No.32 Tahun 2004 terdapat tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu: masa persiapan, tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan yang dimaksud yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Kampanye.
- d. Pemungutan suara.
- e. Penghitungan suara.
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.²

Sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilu secara serentak di sejumlah daerah, penyelenggaraan pemilu serentak dimulai di sejumlah daerah mulai 9 Desember 2015 lalu. Seperti dalam pasal 201 yang berbunyi “*Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada*

tahun 2015 dan bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”.

Di samping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana dikemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi tatanan politik yang stabil karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat. Selain itu, dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Sebagai kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau merupakan lumbung suara pada setiap pesta demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau merupakan satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah penduduk yang menjadi daftar pemilih tetap di kecamatan ini adalah 157.060 jiwa. Ironisnya partisipasi masyarakat kecamatan Mandau dapat dikatakan cukup rendah. Data hasil rekapitulasi suara memaparkan hanya 80.964 jiwa atau 51,55% masyarakat Kecamatan Mandau yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Bengkalis 2015 lalu. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Amril Mukminin dan Muhammad dengan jargon AM – MANTAP, pasangan yang kedua yaitu Herliyan Saleh dan Riza Pahlevi dengan jargon HAPPY dan pasangan yang

¹ Prof.H.Rezali Abdullah.S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta PT.Raja Grafindo 2005 hal. 56

² Prof.H.Rezali Abdullah.S.H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta PT.Raja Grafindo 2005 hal. 64

ketiga yaitu Sulaiman Zakaria dan Charis Noor Putra dengan jargon IDAMAN. Hasil pilkada Kabupaten Bengkalis menetapkan pasangan Amril Mukminin dan Muhammad sebagai pemenang dengan total suara 99.195 atau 45,

Kata golput adalah singkatan dari golongan putih. Makna inti dari golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak pemilu pertama tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang pemilu. Sedangkan di orde baru, golput sering diartikan sebagai gerakan moral untuk memperotes penerapan system pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa pada saat itu.³

Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan perilaku politik masyarakatnya, karena perilaku politik ikut mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Mandau pada pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015 berkaitan erat dengan perilaku politik masyarakat. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan terhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Dalam masyarakat primitif, dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan yang

lain. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor – faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi.⁴

Pada pilkada tahun 2015 ini dengan jumlah suara 80.964 suara yang sah, jumlah suara turun hampir 8%. Faktor administrasi sangat berpengaruh pada tahun 2015 ini karena sebagian besar kelurahan dan desa baru saja dimekarkan pada tahun 2013. Jika dilihat dari suku, ras, dan agama Kecamatan Mandau merupakan kecamatan yang memiliki jumlah masyarakat yang heterogen dari berbagai suku dan agama.

Desa Bumbang dan Desa Pamesi merupakan desa yang terletak di ujung Kecamatan Mandau. Desa Bumbang merupakan desa terluas di Kecamatan Mandau sehingga pada tahun 2012 di mekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Pamesi. Kedua desa ini memiliki persamaan dalam hal perilaku politik yaitu perilaku tidak memilih yang tinggi dalam pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015. Hal yang mendasar dari perilaku tidak memilih masyarakat Desa Bumbang dan Desa Pamesi yaitu kesadaran dan kepercayaan yang kurang oleh masyarakat kepada pemerintah, calon yang akan maju dan kepada penyelenggara pemilu(KPU).

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang ada penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dan akan dibahas dalam proposal, yaitu : Apa faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi dalam pemilukada Kabupaten Bengkalis di kecamatan

³ Bismar Arianto, *Analisis Masyarakat Tidak Memilih Talam Pemilu* (dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Vol. 1 No.1, 2011) hlm 51

⁴ Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm 129

Mandau khususnya Desa Bumbang dan Desa Pamesi tahun 2015 ?

KERANGKA TEORI

a. Perilaku Politik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, faktor administrasi dan faktor sosial ekonomi.

1) Faktor Psikologis

Penjelasan non voting dari faktor psikologi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya.

2) Sistem Politik

Hasil studi Tingsten menyimpulkan bahwa dinegara-Negara yang menerapkan sistem pemilu atau system perwakilan berimbang seperti Negara-Negara Eropa Barat, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi. Sementara Negara-Negara yang menerapkan sistem distrik, jumlah kehadiran pemilih relatif rendah.

3) Kepercayaan Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat

terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politisi instan.

4) Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).⁵

5) Faktor Sosial Ekonomi.

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku politik non-voting tersebut. Ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial-ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, ialah :

1. Kesadaran Politik : Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.

⁵ Bismar Arianto, *Analisis Masyarakat Tidak Memilih Talam Pemilu* (dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Vol. 1 No.1, 2011) hlm 58

2. Kepercayaan pada pemerintah :
Penilaian seseorang terhadap pemerintah.

b. Golongan Putih

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman orde baru tahun 1971. Satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap eksistensi rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Sikap orang-orang golput dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar carapenggunaan hak pilih. Golput menurut bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya pertemuan solidaritas. Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan proses politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.

Sikap-sikap orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan diluar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai atau calon kepala daerah. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan.

Eep Saefuloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan.

- a) Golput Teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ketempat pemungutan suara atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
- b) Golput teknis politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
- c) Golput Politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
- d) Golput Ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.⁶

PEMBAHASAN

Gambaran Pilkada di Desa Bumbung dan Desa Pamesi tahun 2015

1.1.1 Gambaran Pilkada Desa Bumbung

Pada Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015 lalu, Desa Bumbung terdata memiliki tingkat partisipasi yang rendah (masyarakat yang memberikan hak suaranya) sebesar 52,25%. Hampir setengah dari jumlah (Daftar Pemilih Tetap) DPT-nya tidak menggunakan hak pilih yaitu sebesar 47,75% dari jumlah DPT pada pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015 lalu. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa Bumbung pada

⁶ Bismar Arianto, *Analisis Masyarakat Tidak Memilih Talam Pemilu* (dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Vol. 1 No.1, 2011) hlm 54

pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015 berkaitan erat dengan perilaku politik masyarakat Desa Bumbung yang memiliki perilaku tidak memilih khususnya tindakan nyata seperti pemberian suara pada pemilu. Adapun penyebabnya yaitu seperti masalah teknis, administratif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dan minimnya sosialisasi.

Menurut hasil per TPS, hampir setengah dari jumlah DPT per TPS tidak menggunakan hak pilihnya. Ada sebelas jumlah TPS di Desa Bumbung yang merupakan tempat masyarakat memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bengkalis. Pada tanggal 9 Desember 2015 tepatnya seluruh masyarakat Desa Bumbung menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dapat di lihat di tabel berikut. Meskipun pemenang di Desa Bumbung pasangan Amril Mukminin dan Muhammad, hal ini terjadi karena efektivitas tim sukses pasangan calon tersebut yang berfungsi dengan baik di Desa Bumbung.

Mengenai kompetisi para calon di Desa Bumbung, hal ini kurang menarik karena selain pasangan nomor urut satu, dua pasangan lainnya kurang gencar dalam mengumpulkan simpatisan mereka di Desa Bumbung. Contohnya saja dalam hal gambar, poster, baliho ,dan spanduk memang diakui masyarakat desa kurangnya sosialisasi terhadap visi dan misi mereka di Desa Bumbung. Berbeda dengan pasangan nomor urut satu yang memiliki tim sukses yang gencar dalam mempromosikan jagoannya. Hal ini didukung oleh pejabat desa yang menjadi tim sukses dari pasangan nomor urut satu yaitu Kaur Kesra Bondan Suhardi dan Kaur Pemerintahan Safrianto.

3.1.2. Gambaran Pilkada Desa Pamesi

Hasil pilkada di Desa Pamesi tidak berbeda jauh dari hasil pilkada di Desa Bumbung. Desa pemekaran dari Desa Bumbung ini merupakan Desa tertinggi tingkat tidak memilihnya di Kecamatan Mandau. Sebagai desa yang baru dimekarkan tepat tiga tahun lalu sebelum diadakannya pilkada 2015 faktor yang paling menonjol penyebab masyarakat tidak memilih yaitu administratif dan kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan masyarakat tidak mengenal pasangan calon yang akan dipilih.

Beberapa penyebab dominan perilaku tidak memilih di Desa Pamesi sangat disayangkan terjadi karena kelalaian petugas panitia pemungutan suara dan kurangnya komunikasi antara panitia pemungutan suara dengan masyarakat. Administrasi yang tidak lengkap, masalah teknis ketika hari pemilihan dan minimnya sosialisasi oleh panitia pemungutan suara menjadi tiga penyebab perilaku tidak memilih masyarakat Desa Pamesi. Dari 7 TPS yang ada di Desa Pamesi terdapat 4 buah TPS yang angka tidak memilihnya diatas 50%. Masyarakat yang bermukim didalam perkebunan banyak sekali yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika dilakukan pemungutan suara 9 Desember 2015 lalu.

Masyarakat tidak mengenal dan mengetahui pasangan calon sebab tidak adanya pasangan calon yang pernah datang untuk berkampanye di Desa Pamesi. Pernah satu waktu pasangan nomor urut 3(Sulaiman Zakaria-Charis Noor Putra) berkunjung ke desa ini namun bukan untuk berkampanye namun hanya sekedar kunjungan pekerjaan. Desa Pamesi merupakan desa yang jauh dari sasaran kampanye ketiga pasangan calon. Hal ini terlihat dari jumlah minimnya spanduk, baliho,

poster dan hal-hal lain yang berbau ketiga pasangan calon.

3.2 Penyebab Masyarakat Desa Bumbung dan Desa Pamesi Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pilkada Bengkalis 2015

1. Desa Bumbung

Rendahnya tingkat partisipasi di Desa Bumbung ini berkaitan erat dengan perilaku politik masyarakat yang memiliki perilaku tidak memilih khususnya tindakan dalam menggunakan atau memberikan hak pilih dalam pilkada ini dan juga pemilu-pemilu yang berlalu. Berikut hasil dari wawancara peneliti terhadap masyarakat yang tidak memilih dalam Pilkada Kabupaten Bengkalis 2015 lalu.

a. Masalah Administrasi

Seorang pemilih tidak dapat ikut memilih karena masalah kependudukan ataupun tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika masalah administrasi yang mendasar saja tidak bisa di selesaikan oleh pihak KPUD bagaimana mungkin tercipta pemilu yang baik dengan tingginya jumlah memilih masyarakat. Hal ini terjadi di Desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Hal ini jelas sangat mempengaruhi jumlah pemilih dalam pilkada karena masih terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih serta tidak mendapatkan undangan dari penyelenggara ataupun petugas KPPS. Keadaan ini diperkuat oleh alasan bahwa masyarakat Desa Bumbung yang sebagian besarnya merupakan warga pendatang yang bekerja di kebun kelapa sawit dan belum melaporkan diri ke pemerintah setempat sehingga tidak terdaftar oleh KPPS. Selain itu, faktor masalah administrasi ini juga disebabkan oleh

tidak adanya pendataan ulang dari pemerintah setempat karena beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 2012, sebagian dari daerah Desa Bumbung dimekarkan menjadi beberapa desa, salah satunya yaitu Desa Pamesi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak terdaftar dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam hal ini, sikap golput yang terjadi pada masyarakat Desa Bumbung akibat permasalahan administratif merupakan kurangnya komunikasi oleh masyarakat dan petugas yang mengurus data pemilih. Pada sisi lain, masyarakat kurang atau bahkan tidak peduli terhadap data kependudukan mereka masing-masing, sementara petugas sudah memberikan angket pendataan namun sedikit yang mengembalikan sehingga tidak bisa di data ulang oleh petugas pendata pemilih Desa Bumbung. Golput yang merupakan akibat dari permasalahan administratif ini dapat diminimalisir apabila proses pendataan pemilih dilakukan dengan metode yang tepat. Petugas pendataan pemilih seharusnya melakukan proses pendataan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah calon pemilih, tidak hanya sekedar meninggalkan angket pendataan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara maksimal.

. Hal ini juga berdampak kepada apatisnya masyarakat terhadap pendataan yang dilakukan oleh petugas pemilihan ketika ditanya mengenai alasan belum memiliki KTP ataupun bukti kependudukan.

Hal ini membuktikan bahwa penyebab lainnya yaitu rasa tidak peduli masyarakat dengan adanya pemilu. Secara geografis, Desa Bumbung merupakan desa yang letaknya lumayan jauh dari pusat kecamatan yaitu kota Duri. Meskipun desa tersebut memiliki Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR)

yang bertugas untuk menyelesaikan masalah administrasi dan kependudukan, namun masyarakat tetap saja enggan untuk mengurusnya karena masalah birokrasi yang berbelit-belit.

Memang sudah ada kebijakan bahwa yang mempunyai masalah seperti yang di sampaikan di atas di beri kesempatan boleh ikut mencoblos di daerah baru dengan cara mengurusnya ke kelurahan setempat, tetapi pengurusan administrasi pada tempat-tempat tertentu terkadang terkesan berbelit-belit. Ujung-ujungnya tetap saja mereka tidak ikut mencoblos pada saat pemilihan.⁷

b. Masalah Teknis

Pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, kita sering mendengar bahwa ada sebagian orang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak dapat mencoblos atau menggunakan hak pilihnya secara benar di tempat pemungutan suara yang telah disediakan. Hal ini merupakan salah satu contoh bentuk kesalahan teknis yang terjadi dan mengakibatkan pemilih tidak mempunyai kesempatan untuk ikut memilih pada saat pemilihan. Dengan demikian, mereka termasuk kategori perilaku tidak memilih karena kesibukan mereka pada hari pemilihan.

Desa Bumbung merupakan desa yang hampir $\frac{3}{4}$ bagian daerahnya merupakan perkebunan kelapa sawit, begitu juga dengan mata pencaharian masyarakat yang berkebun di kebunnya sendiri dan juga sebagai buruh di kebun orang lain. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena harus pergi ke kebun ataupun bekerja, ataupun pergi keluar kota karena adanya urusan lain.

Dari hasil survey dan wawancara tercatat bahwa penyebab

dominan masyarakat Desa Bumbung tidak menggunakan hak pilihnya karena harus bekerja ketika hari pemilihan. Dari jumlah responden wawancara hampir setengah memberikan alasan harus bekerja sehingga mereka tidak datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Kita tidak menutup mata bahwa pemerintah ataupun penyelenggara pemilihan (KPUD/KPPS) sudah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kasus seperti ini tetapi fakta juga menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti ini tetap saja masih ada dan belum dapat dihilangkan. Kurangnya pengalaman penyelenggara petugas pemilihan juga menyebabkan masalah baru yaitu lambatnya penyampaian informasi terhadap masyarakat.

Meskipun pada saat hari pemilihan semua perusahaan dan instansi pemerintahan meliburkan karyawannya, hal ini tidak berpengaruh bagi sebagian masyarakat Desa Bumbung. Oleh karena banyaknya jumlah dari masyarakat menjadi buruh harian lepas di perusahaan perkebunan sehingga meskipun karyawan perusahaan diliburkan, mereka memilih untuk tetap bekerja demi mendapatkan upah dan menafkahi keluarga mereka. Apabila mereka tidak bekerja sehari saja maka mereka tidak akan mendapatkan upah dan keluarga mereka dinafkahi dari hasil kerja satu hari saja. Alasan inilah yang menyebabkan jumlah angka penduduk yang tidak memilih di Desa Bumbung Kecamatan Mandau tinggi.

Untuk Desa Bumbung memang kebanyakan alasan masyarakatnya tidak memberikan suara mereka ketika hari pemilihan karena harus bekerja atau harus mengerjakan sesuatu.

c. Rendahnya Kesadaran Politik

⁷ Rahmat Hollyson, Sri Sundari. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*. Hal 140

Seseorang tidak mengikuti pemilu atau tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak tertarik dengan politik dan tidak menganggap pilkada sebagai suatu hal yang penting. Rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (golput). Bagi kelompok masyarakat yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi tentunya mereka akan terpenggil untuk ikut berpartisipasi aktif dengan cara ikut “mencoblos” di TPS pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang kesadaran yang “rendah” tentunya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah bukan menjadi suatu keharusan. Partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan langsung dapat dikalahkan oleh aktivitas – aktivitas lainnya.⁸

Dalam pilkada di Desa Bumbung dan Desa Pamesi terdapat dua implikasi hal yang mendorong masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan hak pilihnya. *Pertama*, yaitu kesadaran bahwa masyarakat menganggap pemilu itu sebagai hal yang penting atau hanya sekedar kegiatan politik yang kurang berguna untuk masyarakat. *Kedua*, yaitu kepercayaan bahwa apakah masyarakat itu percaya terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah atau masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu karena memiliki pemikiran bahwa itu semua sudah diatur sedemikian rupa agar salah satu pihak dalam pilkada dapat memenangkan pemilukada tersebut.

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara ataupun pemerintah sebagai pelaksana

pemilu merupakan hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan politik. Dalam pemilu, penyelenggara yaitu KPU merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, bebas dan rahasia. Namun dibalik kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, kesadaran masyarakat yang penuh terhadap pentingnya pemilu tidak kalah penting.

Bagi masyarakat Desa Bumbung dan Desa Pamesi kesadaran untuk berpartisipasi kurang. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan berbagai alasan-alasan masyarakat tidak memilih penulis juga mengambil kesimpulan kesadaran berpartisipasi dalam pemilu masyarakat desa Bumbung dan Pamesi sangat kurang. Memang masyarakat yang tidak memilih memiliki alasan jelas mengapa mereka tidak ikut memilih, namun hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Kesadaran masyarakat Desa Bumbung dan Desa Pamesi sangat kurang, masyarakat yang tidak memilih bahwa pemimpin yang terpilih merupakan pemerintah yang akan menentukan kehidupan masyarakat dalam satu kabupaten itu selama lima tahun ke depan. Pemimpin yang terpilih merupakan penentu terwujudnya masa depan yang baik ataupun buruk bagi masyarakat Desa Bumbung dan Pamesi sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakatnya agar memilih calon yang kredibel dan mampu membawa perubahan. Meskipun pada saat ini minim pemimpin daerah yang berprestasi namun masyarakat jangan berputus asa dengan acuh terhadap proses politik yang ada seperti pemilu salah satunya.

⁸ Rahmat Hollyson MZ, Sri sundari. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Hal 139

Penyebab lain rendahnya tingkat kesadaran politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga memberikan dampak terhadap kesadaran untuk berpartisipasi. Pada sebagian orang yang tingkat pendidikannya rendah, mereka sama sekali tidak memahami politik. Kondisi ini diperparah lagi partai politik belum mampu menyentuh kelompok masyarakat. Semestinya partai politik dan pemerintah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat buta akan politik dan enggan untuk berpartisipasi didalamnya. Dari pernyataan diatas bahwa si ibu tidak pernah ikut dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya karena tidak tertarik dan lebih memilih menjaga warungnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik itu kurang menarik untuk masyarakat menengah kebawah dan mereka beranggapan satu suara dari mereka tidak mempengaruhi apapun pada sistem yang ada.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, warga Desa Bumbung rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Sehingga, pemikiran dan pemahaman mereka tentang politik itu juga sangat kurang. Mereka kurang menyadari betapa pentingnya untuk memilih pemimpin bagi daerah mereka.

d. Minimnya Sosialisasi

Salah satu tugas pemerintah dan penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah mensosialisasikan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami semua tahapan pemilihan sehingga mereka

dapat melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada saat pelaksanaannya.

Selain itu, penyelenggara pemilihan bersama-sama dengan pemerintah semestinya juga harus rajin dan proaktif menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, khususnya ikut memberikan suaranya di TPS-TPS yang sudah di sediakan pada hari pelaksanaan pemilihan. Kegiatan yang di lakukan harus lebih terarah dan tepat sasaran. Penyelenggara pemilihan bersama-sama dengan pemerintah harus mengetahui titik-titik yang merupakan wilayah yang penduduknya terindikasi cenderung golput.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mengenal calon Bupati yang akan bertarung dalam pilkada Bengkalis. Untuk Desa Bumbung memang kurang dalam sosialisasi dan kampanye ketiga pasangan calon. Begitu juga dengan panitia pemungutan suara yang hanya mendatangi rumah warga dan mengajak memilih Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015, namun siapa orangnya, bagaimana visi misinya, dan apa tujuannya masyarakat Desa Bumbung tidak mengetahui.

Pentingnya sosialisasi dalam kehidupan politik masyarakat sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sosialisasi yang dilakukan juga bukan sekedar sosialisasi namun harus menjurus dan mengajak masyarakat agar kembali menggunakan hak pilihnya dengan benar dan ikut dalam setiap aktivitas politik yang terjadi.

2. Desa Pamesi

Dengan hasil pilkada yang sudah diketahui Desa Pamesi merupakan desa

tertinggi tingkat masyarakat tidak memilihnya. Adapun penyebab-penyebab yang menjadi permasalahan hasil pilkada di Desa Pamesi telah peneliti temukan berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak memilih. Alasan dominan dari seluruh informan wawancara penulis yaitu karena tidak mengenal pasangan calon. Masyarakat tidak mengenal pasangan calon karena minimnya sosialisasi mengenai pilkada dan siapa pasangan calon yang akan maju dalam pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015 lalu.

Sosialisasi calon sangat diperlukan bagi masyarakat agar mengetahui visi misi dari pasangan calon, siapa calon yang maju, dan bagaimana *track record* dari pasangan calon tersebut. Selain itu peranan dari pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan yang minim di Desa Pamesi turut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 lalu. Sosialisasi sebelum pemilihan sangat lah penting dilakukan bagi sebuah desa, terutama desa yang baru mekar seperti Desa Pamesi.

a. Administratif

Faktor administratif merupakan faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak mempunyai identitas kependudukan (KTP). Hal administratif inilah yang membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kasus seperti di Desa Pamesi merupakan satu contohnya, dimana lebih dari setengah jumlah masyarakatnya tidak menggunakan hak pilih dikarenakan hal administratif ini. Secara otomatis masyarakat yang tidak

dapat memilih ini termasuk ke dalam kategori perilaku tidak memilih.⁹

Dari hasil pemungutan suara di Desa Pamesi jumlah DPT sebanyak 2.385 jiwa pemilih, terdata 1.034 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan 1.351 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berarti ada sekitar 56% dari jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dan administratif menjadi satu faktor penyebabnya.

Menurut mereka (PPS Desa Pamesi) masyarakat yang di undang untuk datang ke TPS datang dan memilih, namun mereka yang tidak terdaftar di TPS tidak bisa memilih karena menurut peraturan yang ada seseorang memilih harus di tempat dia terdaftar di lokasi pemilihan dan dapat menunjukkan surat undangan. Petugas juga mengeluhkan bahwa data yang mereka berikan ke KPUD berubah dan tidak valid ketika sudah sampai di KPUD. Petugas panitia pemilihan mengeluhkan sistem online yang ada karena sudah tiga kali mereka mendata pemilih dan ketika diserahkan ke kantor kecamatan datanya kembali ke data awal. Hal ini menyebabkan adanya pemilih ganda, bahkan ada satu nama terdaftar di tiga tempat pemilihan. Begitu juga dengan masyarakat yang sudah meninggal tetap masih terdata dan terdaftar, padahal petugas panitia pemilihan sudah memberikan data terbaru kepada kantor kecamatan namun tetap saja data nya kembali ke data awal.

Dari ketujuh jumlah TPS yang ada tercatat TPS 4 dan TPS 7 memiliki jumlah perilaku tidak memilih paling tinggi lebih dari 51%.

⁹ Bismar Arianto, *Analisis Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu* (Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Vol.1 No1, 2011) hal 57

b. Masalah Teknis

Penyebab yang penulis maksud disini adalah kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pemilih sedang sakit ketika hari pemilihan, sedang ada kegiatan lain yang membuat tidak bisa mengikuti pemilihan pada hari itu. Kondisi itulah yang membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat diklasifikasikan kedalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir.¹⁰

Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah dan juga sedang berada atau harus keluar kota. Selanjutnya teknis yang dapat ditolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Teknis yang dapat di tolerir ini seperti adanya keperluan keluarga ataupun memilih untuk pergi berlibur ketika hari pemilihan karena pada saat hari pemilihan merupakan hari libur.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang warga memiliki niat untuk berpartisipasi namun dihalangi oleh keadaan yang mengharuskan untuk pergi berobat membawa anaknya. Hal seperti ini memang tidak terduga oleh siapapun, sehingga Harisman menjadi tergolong kedalam perilaku tidak memilih.

Perilaku tidak memilih karena alasan teknis yang dapat ditolerir ini cenderung tidak mengetahui esensi dari

menggunakan hak pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula. Beberapa penyebab yang paling dominan masyarakat Desa Pamesi tidak memilih yaitu harus bekerja ketika hari pemilihan, tidak berada di tempat ketika hari pemilihan, tidak mengenal pasangan calon, tidak terdaftar sebagai pemilih, dan malas untuk pergi ke TPS ketika hari pemilihan.

Memang diakui oleh panitia pemungutan suara hanya satu pasangan calon saja yang mengunjungi Desa Pamesi dan itu juga bukan berkampanye hanya sekedar berkunjung. Masalah teknis merupakan kesalahan dari kedua pihak yaitu panitia pemilihan dan juga masyarakat. Terdapat lima masalah yang dominan yang dihadapi masyarakat Desa Pamesi ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 lalu.

Masalah teknis harus bekerja juga merupakan jawaban dominan masyarakat mengapa tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat yang harus bekerja lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada harus pergi ke TPS untuk memilih karena jika mereka tidak pergi bekerja penghasilan mereka hari itu tidak ada, gaji mereka dipotong atau harus ke kebun yang lain dan tidak berada ditempat ketika hari pemilihan.

Kebanyakan masyarakat Desa Pamesi merupakan buruh tani harian dibawah naungan PT. Muriniwood. Mereka yang menjadi buruh harian dibayar pada hari mereka kerja, mendapatkan duit ketika hari mereka bekerja.

¹⁰ Bismar Arianto, Analisis Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu (dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Vol. 1 No 1, 2011) hal 56

c. Rendahnya Kepercayaan Politik

Kepercayaan merupakan hal yang mudah didapatkan jika seorang pemimpin atau calon kepala daerah mampu menunjukkan hasil karyanya yang membuat masyarakat lebih sejahtera dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika seorang calon kepala daerah yang maju merupakan orang yang memiliki kemampuan dan didukung oleh masyarakat banyak, hal ini akan mengurangi perilaku tidak memilih. Masyarakat pasti akan membela calonnya jika memang benar-benar membela kepentingan masyarakat. Bukan hanya dengan pencitraan namun dengan tindakan nyata. Jika mampu memberikan hal yang baik dan berperilaku seseorang yang baik maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seperti pemenang pilkada Kabupaten Bengkalis yaitu Amril Mukminin mampu menang di Desa Bumbung dan Desa Pamesi karena masyarakat yang memilih percaya dengan orang satu suku dan satu asal dari mereka sehingga bisa menang di kedua desa ini. Berbeda dengan calon petahana yang kalah telak di dua desa ini karena masyarakat pemilih sudah mengetahui perilaku buruknya yaitu korupsi sehingga masyarakat hilang kepercayaan dan enggan untuk memberikan hak pilihnya kepada calon petahana dalam pilkada 2015 kemarin.

Sosialisasi atau menyebar luaskan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi dimulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terlepas dari itu semua penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan, maka menyebarkan info pemilu dinilai

penting. Apalagi bagi masyarakat yang jauh dari transportasi dan informasi, maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput. Berbeda dengan desa induknya yaitu Desa Bumbung, Desa Pamesi yang berada di ujung Kecamatan Mandau dan merupakan daerah paling jauh dari ibukota kecamatan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis hal ini benar terjadi dan setiap masyarakat desa yang saya tanya mengakui tidak mengetahui siapa calon-calon tersebut. Poto-poto, baliho, spanduk ketiga pasangan calon saja tidak ada di desa bagaimana mereka akan memilih. Setidaknya mereka mengetahui siapa yang akan dipilih beserta visi misinya.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga pasangan calon juga kurang memperhatikan daerah-daerah pemilihan mereka. Bagaimana mungkin masyarakat simpati terhadap ketiga pasangan calon tersebut, sedangkan yang sudah berkampanye saja terkadang tidak dipilih apalagi yang tidak ada melakukan kampanye tidak akan bisa mendapatkan simpati masyarakat.

Mungkin jumlah DPT yang tidak banyak menjadi pendorong bagi pasangan calon tidak melakukan kampanye. Kampanye berguna untuk memberitahukan atau menyampaikan ke masyarakat bahwa mereka yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk beberapa tahun kedepannya, disaat itulah mereka dapat menyampaikan visi dan misi mereka dalam membangun kesejahteraan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakatnya nanti.

5. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang perilaku politik masyarakat Kecamatan

Mandau khususnya Desa Bumbang dan Desa Pamesi pada Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Bumbang dan Desa Pamesi pada pilkada kabupaten Bengkalis terdapat perilaku tidak memilih yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Tidak ada bedanya desa induk dan desa pemekaran, kedua desa memiliki perilaku tidak memilih yang penyebabnya sama. Hal ini disebabkan oleh perilaku politik masyarakat Desa Bumbang dan Desa Pamesi tidak simpati terhadap proses politik yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2015. Masyarakat kurang mengerti akan pentingnya partisipasi dalam politik yaitu memberikan suara pada saat pilkada. Hal ini juga didukung oleh kurangnya persaingan dalam kompetisi oleh ketiga pasangan calon yang maju dalam pilkada Kabupaten Bengkalis 2015 di Desa Bumbang dan Desa Pamesi. Faktor administrasi dan minimnya sosialisasi menjadi penyebab tingginya tingkat perilaku tidak memilih di Desa Bumbang dan Desa Pamesi.

Dapat dilihat penyebab masyarakat tidak memberikan hak pilihnya karena alasan harus bekerja, tidak ditempat ketika pemilihan, tidak mengenal pasangan calon, tidak terdaftar sebagai pemilih dan malas untuk pergi ke TPS untuk memilih. Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara maupun pemerintah akan adanya perubahan melalui pilkada menjadi hal serius untuk Desa Bumbang dan Desa Pamesi. Namun semua itu memang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat Desa Bumbang dan Desa Pamesi dan tingkat kepercayaan kepada pasangan calon yang maju dalam pemilihan yang minim. Masyarakat yang juga kurang

simpati karena adanya salah satu calon yang menjadi tersangka kasus korupsi maju dalam pilkada dan sebagai calon incumbent/petahana dalam pilkada Bengkalis tahun 2015 tersebut. Masyarakat menginginkan sosok calon pemimpin yang baru karena merasa pemimpin yang maju adalah wajah-wajah lama.

1.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak penyelenggara dan peserta pilkada selanjutnya. Yang mana dalam menyelenggarakan pemilu dan mengurangi angka tidak memilih harus memberikan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat agar masyarakat mengerti akan pentingnya berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum.

Butuh peningkatan kepercayaan dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat agar perilaku tidak memilih ini berkurang. Siapa yang wajib untuk membenahi ini yaitu pemerintah dan penyelenggara yang harus bisa memperbaiki calon-calon yang lebih baik lagi ketika akan maju dalam pemilihan. Hal ini juga harus didukung oleh partai politik karena partai politik sebagai wadah atau sarana bagi setiap calon yang akan maju dalam pencalonan kepala daerah. Partai politik diharapkan mampu melakukan rekrutmen yang baik terhadap kadernya ataupun calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi Pemilihan kepala daerah selanjutnya diharapkan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan diharapkan calon-calon pemimpin yang maju yaitu mereka yang memiliki kredibilitas baik dalam agama maupun dalam bermasyarakat. Dengan begitu masyarakat lebih bersimpati dalam memilih dan memberikan suaranya

untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah.

Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Samuel P. Huntington, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Muchtar Mas'ood, Andrews Mac Collin. 1982. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Abdullah, Rezali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT.Raja Grafindo

Subhan Afifi, Nikolaus Loy, Susilastuti DN. *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah*

Michael Rush, Phillip Altoff. *Pengantar Sosiologi Politik*.

Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*. Jakarta: Bestari

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*

SRIPSI

Arianto Aziz. 2008. *Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Di Kecamatan Tampan Dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011*". Jurusan Ilmu

JURNAL

Bismar Arianto. 2011. *Analisis Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Suryana Aminudin. 2011. *Perilaku Politik di Indonesia*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indramayu

Hasanuddin M. Saleh. 2008. *Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Riau*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Jurnal Vol.6/No1/Juni/2008

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Lain-Lain

Kantor Camat Mandau, Kecamatan Mandau Dalam Angka (Mandau Sub Regency In Figures), Badan Pusat Statistik, Bengkalis 2015